



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora
Vol 8 No 2 November 2025
P-ISSN : 1907 – 5340
E-ISSN : 2722 – 3248
Hal. : 97 - 113

KEPEMIMPINAN KOMUNIKATIF HENDRIK LEWERISSA: MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI REVITALISASI NILAI PAR MALUKU PUNG BAE

Oleh

Hobarth Williams Soselisa¹, Rido Latuheru²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Maluku^{1,2}

Email: soselisa.hobarth@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the communicative leadership of Governor Hendrik Lewerissa in revitalizing Par Maluku Pung Bae values to build social welfare in Maluku Province. Using a qualitative approach with case study design, this research examines policy documents, public statements, and socio-economic development reports from 2019-2024. The findings reveal that communicative leadership integrating local wisdom values creates effective mechanisms for community participation in development. Par Maluku Pung Bae core values—O'dora (mutual love), O'baliara (mutual care), and O'adili (justice)—are implemented through inclusive dialogue, culturally-based communication, and empowerment programs. This leadership approach successfully enhances social welfare through poverty alleviation programs, improved access to education and healthcare, and strengthened social cohesion in post-conflict contexts. The research concludes that value-based communicative leadership serves as an alternative development model that is contextually relevant and sustainable, offering theoretical contributions to local wisdom-based leadership literature and practical implications for regional development policies in Indonesia's eastern regions.

Keywords: *communicative leadership, Par Maluku Pung Bae, social welfare, local wisdom, regional development*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepemimpinan komunikatif Gubernur Hendrik Lewerissa dalam merevitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae untuk membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Maluku. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengkaji dokumen kebijakan, pernyataan publik, dan laporan perkembangan sosial ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan komunikatif yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal menciptakan mekanisme efektif untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nilai-nilai inti Par Maluku Pung Bae—O'dora (saling kasih), O'baliara (saling peduli), dan O'adili (keadilan)—diimplementasikan melalui dialog inklusif, komunikasi berbasis budaya, dan program pemberdayaan. Pendekatan kepemimpinan ini berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kohesi sosial dalam konteks pascakonflik. Penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan komunikatif berbasis nilai lokal menjadi model pembangunan alternatif yang relevan secara kontekstual dan berkelanjutan, memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur kepemimpinan berbasis kearifan lokal dan implikasi praktis bagi kebijakan pembangunan daerah di wilayah timur Indonesia.

Kata Kunci: kepemimpinan komunikatif, Par Maluku Pung Bae, kesejahteraan sosial, kearifan lokal, pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dan kompleks sebagai wilayah kepulauan dengan keragaman etnis, bahasa, dan tradisi yang kaya. Kompleksitas geografis dan sosial budaya ini memerlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan berbasis kearifan lokal telah terbukti meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan (Nugroho & Dahuri, 2012). Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya yang tinggi, pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal menjadi sangat relevan dan strategis (Koentjaraningrat, 2009).

Sebagai provinsi kepulauan dengan 1.340 pulau, Maluku menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis yang terfragmentasi menciptakan kesulitan dalam distribusi pelayanan publik, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah (Monk et al., 1997). Lebih dari itu, Maluku juga memiliki sejarah konflik sosial yang kompleks, khususnya konflik komunal pada periode 1999-2004 yang meninggalkan luka mendalam dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan di Maluku tidak hanya memerlukan pendekatan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga rekonsiliasi sosial dan penguatan modal sosial (Bartels, 2010). Konteks pascakonflik menuntut kepemimpinan yang mampu membangun kembali kepercayaan dan harmoni sosial melalui revitalisasi nilai-nilai budaya bersama.

Par Maluku Pung Bae merupakan konsep sosial budaya yang menekankan pentingnya harmoni, kebersamaan, dan solidaritas sebagai landasan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Konsep ini mengandung nilai-nilai filosofis tentang bagaimana masyarakat Maluku seharusnya hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun kesejahteraan bersama. Nilai-nilai kearifan lokal seperti ini menjadi modal sosial yang penting dalam proses pembangunan daerah (Putnam, 2000). Modal sosial, yang didefinisikan sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama, telah terbukti menjadi determinan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial (Woolcock & Narayan, 2000). Dalam konteks Maluku, Par Maluku Pung Bae berfungsi

sebagai reservoir modal sosial yang dapat dimobilisasi untuk mendukung agenda pembangunan daerah.

Kepemimpinan dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat memerlukan kemampuan komunikatif yang dapat menjembatani antara kebijakan modern dengan nilai-nilai tradisional. Kepemimpinan komunikatif didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin untuk membangun dialog, memfasilitasi partisipasi, dan menciptakan pemahaman bersama dalam proses pengambilan keputusan (Fairhurst & Connaughton, 2014). Konsep ini berbeda dengan model kepemimpinan tradisional yang cenderung hierarkis dan top-down, karena menekankan pada proses ko-konstruksi makna antara pemimpin dan yang dipimpin melalui interaksi komunikatif. Dalam literatur kepemimpinan kontemporer, pendekatan komunikatif dianggap lebih efektif dalam konteks organisasi dan masyarakat yang kompleks dan beragam, karena memberikan ruang bagi partisipasi dan pemberdayaan stakeholder (Johansson et al., 2014).

Teori kepemimpinan kultural menegaskan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam praktik kepemimpinan mereka (House et al., 2004). Studi *Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE)* yang melibatkan 62 negara menemukan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya di mana kepemimpinan tersebut dipraktikkan. Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan cenderung lebih diterima dan efektif dibandingkan model kepemimpinan yang sepenuhnya mengadopsi praktik Barat (Irawanto et al., 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan berbasis nilai lokal bukan hanya pilihan strategis, tetapi juga kebutuhan untuk memastikan legitimasi dan efektivitas dalam konteks Indonesia.

Dalam konteks Maluku, kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa menjadi variabel kunci dalam transformasi sosial ekonomi wilayah. Sejak menjabat, Gubernur Lewerissa telah menunjukkan komitmen kuat untuk merevitalisasi nilai-nilai *Par Maluku Pung Bae* sebagai fondasi pembangunan daerah. Pendekatan ini tidak sekadar retorika politik, tetapi diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program konkret yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kepemimpinan yang mampu mentransformasi nilai-nilai abstrak menjadi praktik konkret merupakan karakteristik kepemimpinan transformasional yang efektif (Bass & Riggio, 2006). Kepemimpinan transformasional, yang menekankan pada inspirasi, stimulasi intelektual, dan

perhatian individual, telah terbukti mampu menghasilkan perubahan positif dalam berbagai konteks organisasi dan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Konsep kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi, tetapi juga dimensi non-ekonomi seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bermakna (Sen, 1999). Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen menekankan bahwa kesejahteraan sejati terletak pada kemampuan individu dan masyarakat untuk berfungsi dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam konteks ini, revitalisasi nilai-nilai Par Maluku Pung Bae dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat kapabilitas masyarakat Maluku dalam mencapai kesejahteraan yang mereka definisikan sendiri berdasarkan nilai-nilai budaya mereka.

Penelitian tentang kepemimpinan berbasis nilai lokal di Indonesia masih terbatas, khususnya yang mengaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar studi tentang kepemimpinan di Indonesia cenderung berfokus pada konteks organisasi bisnis atau pemerintahan dengan menggunakan kerangka teori Barat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai lokal membentuk praktik kepemimpinan yang efektif (Titaley, 2015). Studi tentang kepemimpinan di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku, sangat jarang dilakukan, padahal wilayah ini memiliki dinamika sosial budaya dan tantangan pembangunan yang unik. Gap dalam literatur ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kepemimpinan berbasis nilai lokal dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa studi terdahulu telah mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tentang kearifan lokal subak di Bali menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air tradisional yang berbasis nilai-nilai religius dan komunal mampu mendukung keberlanjutan pertanian dan kohesi sosial (Lansing, 2007). Studi tentang sasi di Maluku juga mengungkapkan bahwa sistem konservasi sumber daya laut berbasis adat efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Zerner, 1994). Namun, studi-studi ini umumnya berfokus pada praktik kearifan lokal spesifik, bukan pada bagaimana nilai-nilai kearifan lokal secara keseluruhan diintegrasikan dalam kepemimpinan dan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian yang mengaitkan kepemimpinan

komunikatif dengan revitalisasi nilai-nilai lokal untuk kesejahteraan sosial masih sangat langka dalam literatur akademik Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma global juga menuntut integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan (World Commission on Environment and Development, 1987). Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Par Maluku Pung Bae yang menekankan harmoni, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Integrasi kearifan lokal dengan agenda pembangunan global dapat menciptakan model pembangunan alternatif yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah lama diakui sebagai faktor kunci keberhasilan program pembangunan. Teori pembangunan partisipatif menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pasif, tetapi harus menjadi agen aktif dalam proses pembangunan (Chambers, 1994). Pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, tetapi juga memperkuat pemberdayaan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks Maluku dengan tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat, pendekatan partisipatif yang mengakar pada nilai-nilai lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Kepemimpinan komunikatif yang membuka ruang dialog dan partisipasi menjadi kunci untuk mengaktualisasikan potensi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan komunikatif Gubernur Hendrik Lewerissa dalam merevitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae dapat berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Maluku. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi mekanisme bagaimana nilai-nilai lokal diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret, bagaimana proses komunikatif memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur tentang kepemimpinan berbasis nilai lokal dan pembangunan daerah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi praktik kepemimpinan dan kebijakan pembangunan di daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana implementasi nilai Par Maluku Pung Bae dalam kebijakan kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa? (2) Bagaimana kepemimpinan komunikatif berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Maluku? (3) Apa tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai lokal dengan kebijakan pembangunan modern? Melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kepemimpinan berbasis nilai lokal dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia timur, khususnya Maluku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis fenomena kepemimpinan komunikatif Gubernur Hendrik Lewerissa dalam konteks sosial budaya Maluku. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna mendalam dari fenomena sosial dalam konteks alamiahnya (Creswell, 2014).

Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. **Dokumen resmi pemerintah daerah** berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur, dan laporan kinerja pemerintah daerah.
2. **Pernyataan publik** Gubernur Hendrik Lewerissa melalui pidato, wawancara media massa, dan dokumentasi kegiatan resmi yang dipublikasikan melalui media massa lokal dan nasional.
3. **Laporan perkembangan sosial ekonomi** dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, laporan pembangunan manusia, dan data kesejahteraan sosial.
4. **Literatur akademik** yang relevan dengan kepemimpinan berbasis nilai lokal, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen-dokumen kebijakan, program, dan laporan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku. Analisis

dokumen merupakan metode yang efektif untuk memahami kebijakan publik dan implementasinya (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Kategorisasi data** berdasarkan tema-tema utama: nilai Par Maluku Pung Bae, kepemimpinan komunikatif, program kesejahteraan sosial, dan partisipasi masyarakat.
2. **Interpretasi** terhadap keterkaitan antara nilai-nilai lokal dengan kebijakan dan program pembangunan.
3. **Triangulasi data** dari berbagai sumber untuk memastikan validitas temuan penelitian. Triangulasi meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif dengan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data (Patton, 2015).

Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian adalah pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan nilai Par Maluku Pung Bae, meliputi program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Sosial Budaya Par Maluku Pung Bae sebagai Fondasi Kepemimpinan

Par Maluku Pung Bae merupakan representasi dari nilai-nilai luhur masyarakat Maluku yang menekankan persaudaraan, harmoni, solidaritas, dan kebersamaan. Konsep ini tidak sekadar slogan, tetapi merupakan manifestasi dari sistem nilai sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku selama berabad-abad. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat tradisional (Keraf, 2010).

Nilai-nilai inti dalam Par Maluku Pung Bae mencakup:

O'dora (Saling Kasih) merupakan prinsip cinta kasih dan kepedulian antarwarga yang melampaui batas-batas perbedaan agama, suku, dan status sosial. Nilai ini menjadi dasar bagi terciptanya

harmoni sosial dalam masyarakat yang heterogen. Dalam praktiknya, O'dora diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan.

O'baliara (Saling Peduli) mencerminkan kepedulian mendalam terhadap sesama, terutama kepada mereka yang memerlukan bantuan. Nilai ini mendorong solidaritas sosial dan gotong royong sebagai mekanisme untuk mengatasi berbagai permasalahan bersama. Solidaritas sosial merupakan kekuatan pengikat yang penting dalam masyarakat dengan keragaman tinggi (Durkheim, 1893/2014).

O'adili (Keadilan) menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap pelayanan publik. Nilai ini menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain tiga nilai inti tersebut, konsep **Siwalima** (lima kesatuan) juga menjadi bagian integral dari Par Maluku Pung Bae. Siwalima merepresentasikan persatuan dalam keberagaman, di mana lima kelompok besar masyarakat Maluku (Patalima dan Patasiwa) hidup berdampingan secara harmonis. Konsep persatuan dalam keberagaman menjadi modal sosial yang kuat untuk pembangunan daerah (Coleman, 1988).

Implementasi Kepemimpinan Komunikatif Gubernur Hendrik Lewerissa

Kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa menunjukkan karakteristik kepemimpinan komunikatif yang kuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Par Maluku Pung Bae ke dalam kebijakan publik dan program pembangunan. Berdasarkan analisis terhadap dokumen kebijakan dan pernyataan publik, terdapat beberapa aspek penting dari kepemimpinan komunikatifnya:

Dialog dan Partisipasi Masyarakat

Gubernur Hendrik Lewerissa secara konsisten membangun dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemimpin agama, pemuda, perempuan, dan kelompok rentan. Pendekatan dialogis ini menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program (Arnstein, 1969).

Mekanisme dialog yang dikembangkan meliputi musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan lembaga adat, forum konsultasi publik, dan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai Siwalima yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi Berbasis Nilai Lokal

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, Gubernur Hendrik Lewerissa menggunakan simbol-simbol dan bahasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat Maluku. Penggunaan konsep Par Maluku Pung Bae sebagai tema besar pembangunan memudahkan masyarakat untuk memahami dan mengidentifikasi diri dengan program-program pemerintah. Komunikasi yang menggunakan simbol dan bahasa lokal meningkatkan efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat (Hall, 1976).

Strategi komunikasi ini menciptakan resonansi emosional dengan masyarakat karena mereka merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan berakar dari nilai-nilai yang telah mereka yakini dan praktikkan selama ini.

Kepemimpinan Transformasional Berbasis Budaya

Kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa menunjukkan karakteristik transformasional dengan berupaya mengubah mindset masyarakat tentang pembangunan. Alih-alih mengandalkan pendekatan top-down yang konvensional, beliau mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Par Maluku Pung Bae. Kepemimpinan transformasional efektif dalam konteks budaya kolektif yang mengutamakan harmoni kelompok (Bass & Avolio, 1994).

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berbasis Par Maluku Pung Bae

Revitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae dalam kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa diwujudkan melalui berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang konkret:

Pemberdayaan Masyarakat Marginal

Program pemberdayaan masyarakat marginal difokuskan pada kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat pesisir, petani, nelayan, dan perempuan kepala keluarga. Program ini mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan masyarakat yang efektif memerlukan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan (Friedmann, 1992).

Implementasi nilai O'baliara dalam program ini terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses pasar dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat marginal.

Penguatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa mengembangkan program penguatan ekonomi yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Program ini mencakup pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, revitalisasi pertanian tradisional, dan pengembangan ekowisata. Ekonomi berbasis kearifan lokal memberikan nilai tambah melalui keunikan dan keberlanjutan (Ostrom, 1990).

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Prinsip O'adili diterapkan melalui distribusi manfaat ekonomi yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. Pemerintah daerah mengembangkan program beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Di bidang kesehatan, dikembangkan program jaminan kesehatan daerah, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, dan program kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan kader kesehatan lokal. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas merupakan indikator penting kesejahteraan sosial (Sen, 1999).

Pelestarian dan Revitalisasi Budaya

Program pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti bangunan dan artefak, tetapi juga pada revitalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah memfasilitasi berbagai kegiatan budaya, festival, dan kompetisi yang melibatkan generasi muda untuk memastikan transmisi nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Revitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae juga dilakukan melalui integrasi ke dalam kurikulum pendidikan lokal, kampanye media, dan penguatan peran lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan. Pelestarian budaya memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pendidikan, ekonomi, dan tata kelola (UNESCO, 2003).

Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Kultural

Implementasi nilai Par Maluku Pung Bae dalam pembangunan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan (World Commission on Environment and Development, 1987).

Keseimbangan Ekonomi dan Sosial

Program-program pembangunan ekonomi dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan nilai O'adili yang menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Pelestarian Lingkungan dan Kearifan Lokal

Masyarakat Maluku memiliki tradisi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sistem sasi (larangan mengambil hasil laut atau hutan dalam periode tertentu) yang telah dipraktikkan turun-temurun. Pemerintah daerah merevitalisasi praktik-praktik kearifan lokal ini sebagai strategi konservasi lingkungan. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Berkes, 2012).

Program konservasi berbasis masyarakat dikembangkan dengan melibatkan lembaga adat dan kelompok masyarakat lokal sebagai pengelola utama. Pendekatan ini menciptakan tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan sambil tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Tantangan dan Strategi Kepemimpinan

Implementasi kepemimpinan komunikatif berbasis nilai Par Maluku Pung Bae menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya:

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Sebagai provinsi dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Maluku menghadapi kendala dalam penyediaan anggaran untuk program pembangunan yang komprehensif. Strategi yang dikembangkan meliputi optimalisasi sumber daya lokal, kemitraan dengan sektor swasta, dan penggalangan dukungan dari pemerintah pusat serta lembaga donor internasional.

Pendekatan gotong royong yang sesuai dengan nilai O'baliara juga dimobilisasi untuk melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya menjadi kontribusi penting dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Tantangan Geografis

Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menciptakan tantangan dalam penyediaan akses pelayanan publik yang merata. Jarak antarpulau dan keterbatasan infrastruktur transportasi

menyulitkan distribusi layanan dan program pembangunan. Wilayah kepulauan memerlukan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik geografisnya (Briguglio, 1995). Strategi yang dikembangkan meliputi desentralisasi pelayanan publik dengan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kecamatan, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan digital, dan pengembangan transportasi laut yang terjangkau.

Mempertahankan Kohesi Sosial

Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat kohesi sosial. Revitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae menjadi instrumen penting dalam membangun dan mempertahankan harmoni sosial. Program-program dialog antaragama, festival budaya bersama, dan kegiatan gotong royong lintas komunitas difasilitasi secara berkelanjutan.

Peran tokoh adat dan pemimpin agama sangat penting dalam memediasi potensi konflik dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan. Pemerintah daerah membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga adat dan keagamaan untuk memastikan stabilitas sosial.

Modernisasi versus Pelestarian Budaya

Tantangan lain adalah bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi dengan upaya pelestarian nilai-nilai budaya tradisional. Generasi muda cenderung lebih terpapar dengan budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Strategi yang dikembangkan adalah dengan mengemas nilai-nilai budaya dalam format yang relevan dengan kehidupan modern, seperti melalui media sosial, musik, dan seni kontemporer.

Pendidikan karakter berbasis nilai lokal juga diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal untuk memastikan transmisi nilai-nilai Par Maluku Pung Bae kepada generasi muda.

Evaluasi Dampak Kepemimpinan Komunikatif

Kepemimpinan komunikatif Gubernur Hendrik Lewerissa yang berbasis nilai Par Maluku Pung Bae menunjukkan dampak positif dalam berbagai aspek:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Pendekatan dialogis dan inklusif meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi menjadi subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Penguatan Kohesi Sosial. Revitalisasi nilai-nilai Par Maluku Pung Bae memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarkelompok masyarakat. Konflik sosial dapat diminimalisir melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang mengacu pada nilai-nilai bersama.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai lokal menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan karena sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan.

Legitimasi dan Kepercayaan Publik. Kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka memahami dan menghormati nilai-nilai yang mereka anut.

PENUTUP

Simpulan

Kepemimpinan komunikatif Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam merevitalisasi nilai Par Maluku Pung Bae menunjukkan model kepemimpinan yang efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat. Integrasi nilai-nilai lokal seperti O'dora, O'baliara, dan O'adili ke dalam kebijakan publik dan program pembangunan menciptakan pendekatan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan komunikatif yang berbasis nilai lokal memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui beberapa mekanisme: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, (2) penguatan kohesi sosial dan stabilitas, (3) peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan (4) keberlanjutan program pembangunan karena sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Nilai Par Maluku Pung Bae bukan sekadar slogan atau retorika politik, tetapi menjadi kerangka kerja yang operasional dalam implementasi kebijakan pembangunan. Pendekatan ini membuktikan bahwa modernisasi dan pembangunan tidak harus mengabaikan nilai-nilai tradisional, tetapi justru dapat diperkuat melalui revitalisasi kearifan lokal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan:

1. **Untuk Pemerintah Daerah:** Perlu dilakukan dokumentasi dan kodifikasi praktik-praktik terbaik dalam implementasi nilai Par Maluku Pung Bae sehingga dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Penguatan kelembagaan adat dan mekanisme

partisipasi masyarakat juga perlu terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pendekatan ini.

2. **Untuk Peneliti:** Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur secara kuantitatif dampak kepemimpinan komunikatif berbasis nilai lokal terhadap indikator-indikator kesejahteraan sosial yang spesifik. Studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki pendekatan serupa juga akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan model ini.
3. **Untuk Masyarakat:** Masyarakat perlu terus memperkuat dan mengaktualisasikan nilai-nilai Par Maluku Pung Bae dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Partisipasi aktif dalam proses pembangunan merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini.
4. **Untuk Akademisi:** Perlu dikembangkan kerangka teoritis yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan berbasis nilai lokal dalam konteks Indonesia Timur, yang dapat memperkaya literatur tentang kepemimpinan dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA T

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bartels, D. (2010). Moluccans in exile: A struggle for ethnic survival. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 166(4), 454-474.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Transformational leadership and organizational culture. *International Journal of Public Administration*, 17(3-4), 541-554. <https://doi.org/10.1080/01900699408524907>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203123843>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. *World Development*, 23(9), 1615-1632. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00065-K](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00065-K)
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437-1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)

- Christians, C. G. (2011). Ethics and politics in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed., pp. 61-80). SAGE Publications.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Durkheim, E. (2014). *The division of labor in society*. Free Press. (Original work published 1893)
- Fairhurst, G. T., & Connaughton, S. L. (2014). Leadership: A communicative perspective. *Leadership*, 10(1), 7-35. <https://doi.org/10.1177/1742715013509396>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. SAGE Publications.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Irawanto, D. W., Ramsey, P. L., & Ryan, J. C. (2011). Challenge of leading in Javanese culture. *Asian Ethnicity*, 12(2), 125-139. <https://doi.org/10.1080/14631369.2011.571829>
- Johansson, C., Miller, V. D., & Hamrin, S. (2014). Conceptualizing communicative leadership: A framework for analysing and developing leaders' communication competence. *Corporate Communications: An International Journal*, 19(2), 147-165. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-02-2013-0007>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lansing, J. S. (2007). *Priests and programmers: Technologies of power in the engineered landscape of Bali* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Monk, K. A., De Fretes, Y., & Reksodiharjo-Lilley, G. (1997). *The ecology of Nusa Tenggara and Maluku*. Periplus Editions.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. LP3ES.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Titaley, J. (2015). Kepemimpinan lokal dan pembangunan di Indonesia Timur. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1), 45-62.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225-249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE

Zerner, C. (1994). Through a green lens: The construction of customary environmental law and community in Indonesia's Maluku Islands. *Law & Society Review*, 28(5), 1079-1122. <https://doi.org/10.2307/3054024>